



GUBERNUR JAWA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 188/ 201 /KPTS/013/2021
TENTANG
KODE WILAYAH KEARSIPAN PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka memperlancar dan menciptakan tertib administrasi dalam surat menyurat, perlu adanya kode wilayah kearsipan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kode Wilayah Kearsipan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan . . .

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Kode Wilayah Kearsipan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagaimana tersebut dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 9 April 2021

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR
 NOMOR 188/201/KPTS/013/2021
 TENTANG
 KODE WILAYAH KEARSIPAN PERANGKAT
 DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 PROVINSI JAWA TIMUR

KODE WILAYAH KEARSIPAN

PERANGKAT DAERAH	KODE
1	2
I. KODE WILAYAH KEARSIPAN PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR.	
A. KELOMPOK SEKRETARIAT DAERAH	
1. SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR	000
a. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	010
1) BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	011
- Bagian Pemerintahan	011.1
- Bagian Otonomi Daerah	011.2
- Bagian Kerja Sama	011.3
2) BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	012
- Bagian Bina Mental Spritual	012.1
- Bagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	012.2
- Bagian Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	012.3
3) BIRO HUKUM	013
- Bagian Produk Hukum Provinsi	013.1
- Bagian Pembinaan dan Pengawasan Kebijakan Kabupaten/Kota	013.2
- Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia	013.3
b. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	020
1) BIRO PEREKONOMIAN	021
- Bagian Kebijakan dan Sarana Perekonomian	021.1
- Bagian Badan Usaha Milik Daerah, Investasi Daerah dan Badan Layanan Usaha Daerah	021.2
- Bagian Sumber Daya Alam	021.3

2) BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	022
- Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	022.1
- Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	022.2
- Bagian Pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa	022.3
3) BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	023
- Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	023.1
- Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	023.2
- Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	023.3
c. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	030
1) BIRO ORGANISASI	031
- Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan	031.1
- Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	031.2
- Bagian Tatalaksana	031.3
2) BIRO UMUM	032
- Bagian Tata Usaha	032.1
- Bagian Rumah Tangga	032.2
- Bagian Administrasi Keuangan dan Aset	032.3
3) BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	033
- Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Sekretariat Daerah	033.1
- Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan	033.2
- Bagian Protokol	033.3
2. STAF AHLI GUBERNUR	040
a. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik	040.1
b. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan	040.2
c. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia	040.3
3. SEKRETARIAT DPRD	050
- Bagian Umum	050.1
- Bagian Persidangan	050.2
- Bagian Keuangan	050.3
- Bagian Perundang-undangan	050.4
- Kelompok Jabatan Fungsional	050.5

4. INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TIMUR	060
- Sekretariat	060.1
- Inspektur Pembantu I	060.2
- Inspektur Pembantu II	060.3
- Inspektur Pembantu III	060.4
- Inspektur Pembantu IV	060.5
- Inspektur Pembantu Khusus	060.6
- Kelompok Jabatan Fungsional	060.7
B. KELOMPOK DINAS PROVINSI	100
1. DINAS PENDIDIKAN	101
- Sekretariat	101.1
- Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	101.2
- Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	101.3
- Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus	101.4
- Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan	101.5
- Cabang Dinas	101.6
- Unit Pelaksana Teknis	101.7
- Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan	101.8
- Kelompok Jabatan Fungsional	101.9
2. DINAS KESEHATAN	102
- Sekretariat	102.1
- Bidang Kesehatan Masyarakat	102.2
- Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	102.3
- Bidang Pelayanan Kesehatan	102.4
- Bidang Sumber Daya Kesehatan	102.5
- Unit Organisasi Bersifat Khusus (Rumah Sakit)	
❖ RSUD Dr. Soetomo	102.6
❖ RSUD Dr. Saiful Anwar	102.7
❖ RS Jiwa Menur	102.8
❖ RSUD dr. Soedono	102.9
❖ RSUD Haji Provinsi Jawa Timur	102.10
❖ RS Mata Masyarakat Jawa Timur	102.11
❖ RS Paru Jember	102.12
❖ RSUD Karsa Husada Batu	102.13

❖ RS Paru Manguharjo Madiun	102.14
❖ RSUD Sumberglagah	102.15
❖ RSUD Mohammad Noer Pamekasan	102.16
❖ RSUD Husada Prima	102.17
❖ RSUD Dungus	102.18
❖ RSUD Daha Husada Kediri	102.19
- Unit Pelaksana Teknis	102.20
- Kelompok Jabatan Fungsional	102.21
3. DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	103
- Sekretariat	103.1
- Bidang Pengaturan dan Pengendalian	103.2
- Bidang Bina Teknik	103.3
- Bidang Pembangunan dan Peningkatan	103.4
- Bidang Pemeliharaan	103.5
- Unit Pelaksana Teknis	103.6
- Kelompok Jabatan Fungsional	103.7
4. DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR	104
- Sekretariat	104.1
- Bidang Perencanaan Sumber Daya Air	104.2
- Bidang Sungai, Waduk, dan Pantai	104.3
- Bidang Irigasi	104.4
- Bidang Bina Manfaat	104.5
- Unit Pelaksana Teknis	104.6
- Kelompok Jabatan Fungsional	104.7
5. DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	105
- Sekretariat	105.1
- Bidang Tata Bangunan dan Jasa Kontruksi	105.2
- Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	105.3
- Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman	105.4
- Bidang Penataan Ruang Wilayah	105.5
- Unit Pelaksana Teknis	105.6
- Kelompok Jabatan Fungsional	105.7

6. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	106
- Sekretariat	106.1
- Bidang Penegakan Peraturan Daerah	106.2
- Bidang Ketentraman dan Keteriban Umum	106.3
- Bidang Sumber Daya Aparatur	106.4
- Bidang Perlindungan Masyarakat	106.5
- Kelompok Jabatan Fungsional	106.6
7. DINAS SOSIAL	107
- Sekretariat	107.1
- Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	107.2
- Bidang Penanganan Fakir Miskin dan dan Pemberdayaan Sosial	107.3
- Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	107.4
- Bidang Pengembangan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	107.5
- Unit Pelaksana Teknis	107.6
- Kelompok Jabatan Fungsional	107.7
8. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	108
- Sekretariat	108.1
- Bidang Pelatihan dan Produktivitas	108.2
- Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	108.3
- Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial	108.4
- Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja	108.5
- Bidang Transmigrasi	108.6
- Unit Pelaksana Teknis	108.7
- Kelompok Jabatan Fungsional	108.8
9. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KEPENDUDUKAN	109
- Sekretariat	109.1
- Bidang Kesetaraan Gender	109.2
- Bidang Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak	109.3
- Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	109.4
- Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Ketahanan Keluarga	109.5
- Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	109.6

- Unit Pelaksana Teknis	109.7
- Kelompok Jabatan Fungsional	109.8
10. DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	110
- Sekretariat	110.1
- Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian	110.2
- Bidang Tanaman Pangan	110.3
- Bidang Tanaman Hortikultura	110.4
- Bidang Ketahanan Pangan	110.5
- Unit Pelaksana Teknis	110.6
- Kelompok Jabatan Fungsional	110.7
11. DINAS LINGKUNGAN HIDUP	111
- Sekretariat	111.1
- Bidang Tata Lingkungan	111.2
- Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	111.3
- Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	111.4
- Bidang Penataan Lingkungan Hidup	111.5
- Unit Pelaksana Teknis	111.6
- Kelompok Jabatan Fungsional	111.7
12. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	112
- Sekretariat	112.1
- Bidang Bina Pemerintahan Desa	112.2
- Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa	112.3
- Bidang Penataan dan Kerja Sama Desa	112.4
- Bidang Kemasyarakatan Desa	112.5
- Unit Pelaksana Teknis	112.6
- Kelompok Jabatan Fungsional	112.7
13. DINAS PERHUBUNGAN	113
- Sekretariat	113.1
- Bidang Pengembangan Transportasi dan Multimoda	113.2
- Bidang Lalu Lintas Jalan	113.3
- Bidang Angkutan dan Keselamatan Jalan	113.4
- Bidang Perhubungan Laut dan Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan	113.5

- Unit Pelaksana Teknis	113.6
- Kelompok Jabatan Fungsional	113.7
14. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	114
- Sekretariat	114.1
- Bidang Informasi Publik	114.2
- Bidang Komunikasi Publik	114.3
- Bidang Aplikasi Informatika	114.4
- Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	114.5
- Bidang Pengelolaan Data Statistik	114.6
- Unit Pelaksana Teknis	114.7
- Kelompok Jabatan Fungsional	114.8
15. DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	115
- Sekretariat	115.1
- Bidang Kelembagaan dan Pengawasan	115.2
- Bidang Produksi dan Restrukturisasi Usaha	115.3
- Bidang Pemasaran	115.4
- Bidang Pembiayaan	115.5
- Unit Pelaksana Teknis	115.6
- Kelompok Jabatan Fungsional	115.7
16. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	116
- Sekretariat	116.1
- Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	116.2
- Bidang Promosi Penanaman Modal	116.3
- Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	116.4
- Bidang Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	116.5
- Bidang Pelayanan Perizinan Sektor Pembangunan dan Perekonomian	116.6
- Bidang Pelayanan Perizinan Sektor Kesejahteraan Rakyat dan Lingkungan Hidup	116.7
- Bidang Pengaduan, Penyuluhan, dan Pelaporan Layanan	116.8
- Unit Pelaksana Teknis	116.9
- Kelompok Jabatan Fungsional	116.10

17. DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	117
- Sekretariat	117.1
- Bidang Kepemudaan	117.2
- Bidang Keolahragaan	117.3
- Bidang Kemitraan Kepemudaan dan Keolahragaan	117.4
- Bidang Pengembangan Manajemen Kepemudaan dan Keolahragaan	117.5
- Unit Pelaksana Teknis	117.6
- Kelompok Jabatan Fungsional	117.7
18. DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	118
- Sekretariat	118.1
- Bidang Kebudayaan	118.2
- Bidang Cagar Budaya dan Sejarah	118.3
- Bidang Pemasaran Pariwisata	118.4
- Bidang Destinasi Pariwisata	118.5
- Bidang Industri Pariwisata	118.6
- Unit Pelaksana Teknis	118.7
- Kelompok Jabatan Fungsional	118.8
19. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	119
- Sekretariat	119.1
- Bidang Deposit, Akuisisi, Pelestarian, dan Pengolahan Bahan Perpustakaan	119.2
- Bidang Pelayanan Perpustakaan dan Informasi	119.3
- Bidang Pengembangan Sumber Daya	119.4
- Bidang Penyelamatan dan Pendayagunaan Kearsipan	119.5
- Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan	119.6
- Unit Pelaksana Teknis	119.7
- Kelompok Jabatan Fungsional	119.8
20. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	120
- Sekretariat	120.1
- Bidang Perikanan Budidaya	120.2
- Bidang Perikanan Tangkap	120.3
- Bidang Kelautan Pesisir dan Pengawasan	120.4
- Bidang Pengolahan dan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan	120.5

- Cabang Dinas	120.6
- Unit Pelaksana Teknis	120.7
- Kelompok Jabatan Fungsional	120.8
21. DINAS PERKEBUNAN	121
- Sekretariat	121.1
- Bidang Produksi Tanaman Semusim	121.2
- Bidang Produksi Tanaman Tahunan	121.3
- Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil	121.4
- Bidang Perlindungan Perkebunan	121.5
- Unit Pelaksana Teknis	121.6
- Kelompok Jabatan Fungsional	121.7
22. DINAS PETERNAKAN	122
- Sekretariat	122.1
- Bidang Perbibitan, Pakan dan Produksi Peternakan	122.2
- Bidang Kesehatan Hewan	122.3
- Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner	122.4
- Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	122.5
- Unit Pelaksana Teknis	122.6
- Kelompok Jabatan Fungsional	122.7
23. DINAS KEHUTANAN	123
- Sekretariat	123.1
- Bidang Planologi Kehutanan	123.2
- Bidang Konservasi Sumber Daya Hutan dan Ekosistem	123.3
- Bidang Pengelolaan Hutan Produksi Lestari	123.4
- Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial	123.5
- Cabang Dinas	123.6
- Unit Pelaksana Teknis	123.7
- Kelompok Jabatan Fungsional	123.8
24. DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	124
- Sekretariat	124.1
- Bidang Pertambangan	124.2
- Bidang Ketenagalistrikan	124.3
- Bidang Geologi dan Air Tanah	124.4
- Bidang Energi	124.5

- Cabang Dinas	124.6
- Unit Pelaksana Teknis	124.7
- Kelompok Jabatan Fungsional	124.8
25. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	125
- Sekretariat	125.1
- Bidang Industri Agro	125.2
- Bidang Industri Non-Agro	125.3
- Bidang Perdagangan Dalam Negeri	125.4
- Bidang Perdagangan Internasional	125.5
- Bidang Pengembangan Industri dan Perdagangan	125.6
- Unit Pelaksana Teknis	125.7
- Kelompok Jabatan Fungsional	125.8
C. KELOMPOK BADAN DAERAH	200
1. BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH	201
- Sekretariat	201.1
- Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	201.2
- Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	201.3
- Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	201.4
- Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	201.5
- Kelompok Jabatan Fungsional	201.6
2. BADAN PENDAPATAN DAERAH	202
- Sekretariat	202.1
- Bidang Perencanaan dan Pengembangan	202.2
- Bidang Pajak Daerah	202.3
- Bidang Retribusi dan Pendapatan lain-lain	202.4
- Bidang Pengendalian dan Pembinaan	202.5
- Unit Pelaksana Teknis	202.6
- Kelompok Jabatan Fungsional	202.7
3. BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	203
- Sekretariat	203.1
- Bidang Anggaran	203.2
- Bidang Perbendaharaan	203.3
- Bidang Akuntansi dan Pelaporan	203.4
- Bidang Aset	203.5
- Bidang Bina Keuangan Kabupaten/Kota	203.6

- Unit Pelaksana Teknis	203.7
- Kelompok Jabatan Fungsional	203.8
4. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	204
- Sekretariat	204.1
- Bidang Perencanaan, Pengadaan, Pengolahan Data dan Sistem Informasi	204.2
- Bidang Pembinaan, Kesejahteraan, dan Perlindungan Hukum Aparatur Sipil Negara	204.3
- Bidang Mutasi	204.4
- Bidang Pengembangan Aparatur Sipil Negara	204.5
- Unit Pelaksana Teknis	204.6
- Kelompok Jabatan Fungsional	204.7
5. BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	205
- Sekretariat	205.1
- Bidang Pengembangan Kompetensi Dasar dan Manajerial	205.2
- Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis	205.3
- Bidang Pengembangan Kompetensi Fungsional dan Sosial Kultural	205.4
- Bidang Pengembangan Pengajaran Kompetensi	205.5
- Kelompok Jabatan Fungsional	205.6
6. BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	206
- Sekretariat	206.1
- Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	206.2
- Bidang Sosial dan Kependudukan	206.3
- Badan Ekonomi dan Pembangunan	206.4
- Bidang Inovasi dan Teknologi	206.5
- Unit Pelaksana Teknis	206.7
- Kelompok Jabatan Fungsional	206.8
7. BADAN PENGHUBUNG DAERAH	207
8. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	208
- Sekretariat	208.1
- Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	208.2
- Bidang Kedaruratan dan Logistik	208.3
- Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi	208.4
- Kelompok Jabatan Fungsional	208.5

9. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	209
- Sekretariat	209.1
- Bidang Hubungan Antar Lembaga	209.2
- Bidang Integrasi Bangsa	209.3
- Bidang Budaya Politik	209.4
- Bidang Kewaspadaan	209.5
- Kelompok Jabatan Fungsional	209.6
10. KELOMPOK BAKORWIL	210
a. BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN (BAKORWIL) MADIUN	211
- Sekretariat	211.1
- Bidang Pemerintahan	211.2
- Bidang Pembangunan Ekonomi	211.3
- Bidang Kemasyarakatan	211.4
- Bidang Sarana dan Prasarana	211.5
- Kelompok Jabatan Fungsional	211.6
b. BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN (BAKORWIL) BOJONEGORO	212
- Sekretariat	212.1
- Bidang Pemerintahan	212.2
- Bidang Pembangunan Ekonomi	212.3
- Bidang Kemasyarakatan	212.4
- Bidang Sarana dan Prasarana	212.5
- Kelompok Jabatan Fungsional	212.6
c. BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN (BAKORWIL) MALANG	213
- Sekretariat	213.1
- Bidang Pemerintahan	213.2
- Bidang Pembangunan Ekonomi	213.3
- Bidang Kemasyarakatan	213.4
- Bidang Sarana dan Prasarana	213.5
- Kelompok Jabatan Fungsional	213.6

d. BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN (BAKORWIL) PAMEKASAN	214
- Sekretariat	214.1
- Bidang Pemerintahan	214.2
- Bidang Pembangunan Ekonomi	214.3
- Bidang Kemasyarakatan	214.4
- Bidang Sarana dan Prasarana	214.5
- Kelompok Jabatan Fungsional	214.6
e. BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN (BAKORWIL) JEMBER	215
- Sekretariat	215.1
- Bidang Pemerintahan	215.2
- Bidang Pembangunan Ekonomi	215.3
- Bidang Kemasyarakatan	215.4
- Bidang Sarana dan Prasarana	215.5
- Kelompok Jabatan Fungsional	215.6
II. KODE WILAYAH KEARSIPAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI LINGKUNGAN PROVINSI JAWA TIMUR	400
1. Kota Madiun	401
2. Kabupaten Madiun	402
3. Kabupaten Magetan	403
4. Kabupaten Ngawi	404
5. Kabupaten Ponorogo	405
6. Kabupaten Trenggalek	406
7. Kabupaten Tulungagung	407
8. Kabupaten Pacitan	408
9. Kabupaten Blitar	409
10. Kota Blitar	410
11. Kabupaten Nganjuk	411
12. Kabupaten Bojonegoro	412
13. Kabupaten Lamongan	413
14. Kabupaten Tuban	414
15. Kabupaten Jombang	415
16. Kabupaten Mojokerto	416
17. Kota Mojokerto	417
18. Kabupaten Kediri	418

19. Kota Kediri	419
20. Kota Malang	420
21. Kabupaten Malang	421
22. Kota Batu	422
23. Kota Pasuruan	423
24. Kabupaten Pasuruan	424
25. Kota Probolinggo	425
26. Kabupaten Probolinggo	426
27. Kabupaten Lumajang	427
28. Kabupaten Jember	428
29. Kabupaten Banyuwangi	429
30. Kabupaten Bondowoso	430
31. Kabupaten Situbondo	431
32. Kabupaten Pamekasan	432
33. Kabupaten Bangkalan	433
34. Kabupaten Sampang	434
35. Kabupaten Sumenep	435
36. Kota Surabaya	436
37. Kabupaten Gresik	437
38. Kabupaten Sidoarjo	438
III. WILAYAH KERJA BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	
A. BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN (BAKORWIL) MADIUN	
1. Kabupaten Madiun;	
2. Kabupaten Magetan;	
3. Kabupaten Ngawi;	
4. Kabupaten Ponorogo;	
5. Kabupaten Trenggalek;	
6. Kabupaten Tulungagung;	
7. Kabupaten Pacitan;	
8. Kabupaten Kediri;	
9. Kota Madiun;	
10. Kota Kediri.	

B. BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN (BAKORWIL) BOJONEGORO

1. Kabupaten Bojonegoro;
2. Kabupaten Lamongan;
3. Kabupaten Tuban;
4. Kabupaten Jombang;
5. Kabupaten Mojokerto;
6. Kabupaten Gresik;
7. Kabupaten Nganjuk;
8. Kota Mojokerto.

C. BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN (BAKORWIL) MALANG

1. Kabupaten Malang;
2. Kabupaten Pasuruan;
3. Kabupaten Sidoarjo;
4. Kabupaten Blitar;
5. Kota Blitar;
6. Kota Malang;
7. Kota Batu;
8. Kota Surabaya.

D. BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN (BAKORWIL) PAMEKASAN

1. Kabupaten Pamekasan;
2. Kabupaten Bangkalan;
3. Kabupaten Sampang;
4. Kabupaten Sumenep.

E. BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN (BAKORWIL) JEMBER

1. Kabupaten Jember;
2. Kabupaten Lumajang;
3. Kabupaten Bondowoso;
4. Kabupaten Situbondo;
5. Kabupaten Probolinggo;

6. Kabupaten Banyuwangi;	
7. Kota Probolinggo.	

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA